

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI

KABUPATEN BATANG

Ramadhan Nur Gilang, Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP., M.Si.

Email: gilangrng86@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro, Tembalang, Kota Semarang, 50275

Telepon: 024-7465407

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Batang. dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Volume sampah yang dihasilkan semakin bertambah, sementara kapasitas pengelolaan sampah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang ,PT. Ardhya Rizky Laju Abadi dan masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator *collaborative governance* yang meliputi kondisi awal, komponen proses, struktur dan tata kelola, kontigensi dan kendala, serta hasil dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang berdasarkan teori Bryson, Crosby, dan Stone memiliki lima indikator utama. Kondisi awal telah berjalan baik dengan adanya koordinasi rutin antar pihak untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi. Komponen proses juga berjalan baik karena pemerintah dan swasta telah melaksanakan seluruh tahapan mulai dari koordinasi hingga pelaksanaan. Struktur dan tata kelola berjalan dengan baik, ditandai dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Namun, kontigensi dan kendala belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah meskipun pembagian tugas sudah ada. Hasil dan akuntabilitas juga belum optimal karena belum terjadi perubahan signifikan pada volume sampah dan belum menunjukkan hasil nyata dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, optimalisasi sistem retribusi sampah untuk mningkatkan pendapatan daerah, serta penguatan mekanisme evaluasi dan monitoring dalam kerangka *collaborative governance* agar pengelolaan sampah di Kabupaten Batang dapat lebih berkelanjutan dan efektif.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, **Pengelolaan Sampah, Kabupaten Batang**

ABSTRACT

Waste management is one of the main challenges in achieving sustainable development in Batang Regency. With the increasing population and economic activities, the volume of waste generated continues to grow, while waste management capacity remains limited. This study aims to explain and analyze *collaborative governance* in waste management in Batang Regency. The research method used is a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, including the Batang Regency Environmental Service, PT. Ardhya Rizky Laju Abadi, and the community. The analysis was conducted using the collaborative governance indicators developed by Bryson, Crosby, and Stone, which include initial conditions, process components, structure and governance, contingencies and constraints, and outcomes and accountability. The results show that collaborative governance in waste management in Batang Regency has met the five main indicators. Initial conditions have been well established through regular coordination meetings between stakeholders to identify challenges and find solutions. Process components are also functioning effectively, as both the government and private sector have carried out all phases, from coordination to implementation. Structure and governance are clearly defined through the clear division of tasks and responsibilities. However, contingencies and constraints remain ineffective due to the low public awareness regarding waste management, despite the established division of roles. Outcomes and accountability are also not yet optimal, as there has been no significant reduction in waste volume or tangible results in waste management. This study recommends increasing public outreach and education, optimizing the waste retribution system to boost regional income, and strengthening the evaluation and monitoring mechanisms within the framework of collaborative governance to ensure more sustainable and effective waste management in Batang Regency.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Batang Regency

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan serius bagi Indonesia. Sampah wajib diolah dengan tepat supaya tidak semakin meningkat, karena jumlah tumpukan sampah telah menyentuh 175.000 ton/hari. Mengacu pada hasil riset yang dijalankan, berikut ialah pola pengelolaan sampah di beberapa kota di Indonesia; 69% diangkut dan ditimbun di TPA, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 7% sisanya tidak terkelola. Saat ini, 90% lebih kota/kabupaten di Indonesia masih menggunakan sistem *open dumping*, yakni sampah hanya dibuang ke tempat pembuangan akhir tanpa dikelola. Selain itu, terbatasnya pengelolaan dan pemilahan sampah menjadikan sampah menumpuk di TPA (Fitri, 2019).

Perkembangan tata kelola pada pemerintahan, *collaborative governance* (tata kelola pemerintahan kolaborasi) menjadi fenomena dan *trend* baru yang menarik di teliti (Ansell dan Gash, 2008). Dalam kebijakan publik bagian lingkungan hidup tersirat di beberapa regulasi pemerintah untuk melibatkan *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) di Indonesia. Bermulaan pemerintahan berpola *collaborative governance* terlihat semakin berkembang di berbagai daerah seiring dengan adanya agenda otonomi daerah.

Collaborative governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki para pemegang kepentingan tersebut (Sambodo, 2016).

Anshell dkk (dalam Tresiena dkk, 2017) mengkonfirmasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan terdapat aktor-aktor yang kompeten.

Kabupaten Batang pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 817.100 jiwa (BPS Kabupaten Batang, 2022). Setiap hari, kabupaten Batang memproduksi 40 ton sampah dengan rata-rata pengangkutan hanya 50 ton sampah per hari dan daya tampung 35 ton sampah/hari. Hal ini mengakibatkan meluapnya muatan sampah di TPA yang bisa mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar (Darmasaputra, 2020). Satu-satunya tempat pembuangan akhir di Kabupaten Batang ialah TPA Randukuning. Dimana, TPA ini

masih menggunakan sisten *open dumping* yang berarti sampah tidak dikurangi/dikelola sebelum dibuang ke TPA. Sehingga, TPA Randukuning menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan pengelolaan sampah (Darmasaputra dan Hariani 2019). Selain itu pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan kualitas pelayanan kebersihan masih belum baik. Hal ini yang menyebabkan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak layak pakai, dan tidak terawat yang menyebabkan terhambatnya pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir. Pemerintah Kabupaten Batang perlu melaksanakan *collaborative governance* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang efisien mengingat banyak kekurangan dalam aspek-aspek penting pengelolaan sampah.

produksi sampah yang terjadi tergolong masih tinggi sedangkan sampah yang terangkut setiap tahun terus menurun hal ini menyebabkan pengelolaan sampah masih kurang maksimal. Dalam merespon kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Batang perlu melaksanakan *collaborative governance* mengenai pengelolaan sampah dengan harapan kesehatan masyarakat terjamin, keadaan lingkungan semakin membaik dan bisa memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Meskipun dalam

penerapannya masih minim karena perkembangan volume sampah yang terangkut untuk disalurkan pada sarana prasarana persampahan di wilayah Kabupaten Batang sebesar 47,46% (BPS Kabupaten Batang, 2022). Dimana target pelayanan sampah Kabupatne Batang pada tahun 2021 ialah 74% untuk sampah rumah tangga dan sejenisnya sesuai dengan Perbup No. 40/2019.

Sumber daya manusia di DLH Kabupaten Batang masih memiliki kekurangan dari segi kuantitas yang mana jumlah pengelola sampah dari bidang UPT Persampahan belum bisa menangani sampah di 15 kecamatan Kabupaten Batang. Selain itu masih banyak kekurangan dalam pemenuhan fasilitas untuk menangani sampah yang ada di Kabupaten Batang, dan berikut data fasilitas penanganan sampah di Kabupaten Batang (Damanhuri dan Padmi 2019). Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dapat menghambat keberjalanan dari pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Batang. hal ini diperlukan kerjasama melalui *collaborative governance* dengan sektor swasta untuk dapat membantu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. Dilihat dari gambar di atas fasilitas penanganan sampah di setiap kecamatan Kabupaten Batang masih

banyak yang kurang terpenuhi yang menyebabkan penanganan sampah masih belum maksimal. Oleh sebab itu, tindak lanjut pengelolaan sampah di Kabupaten Batang membutuhkan *collaborative governance* dari seluruh komponen baik Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang, sektor swasta, dan masyarakat untuk bisa saling berkolaborasi mewujudkan pengelolaan sampah.

Mengacu pada pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk menjalankan riset mendalam dengan tujuan untuk meneliti proses keberjalanan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, swasta, dan masyarakat. Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan program pengelolaan sampah di Kabupaten Batang, serta memperkaya literatur akademis tentang kemitraan sektor Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam konteks pelaksanaan kebijakan.

B. KAJIAN TEORI

1. *Collaborative Governance*

collaborative governance yang dikembangkan oleh Bryson, Crosby, dan Stone (2006) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai kerjasama antar lintas sektor yang dapat terlihat melalui penekanan

lima hal.

Pertama, kondisi awal yang berfokus pada kolaborasi pengelolaan sampah yang luas, resiko yang dihadapi, dan syarat khusus yang wajib dipenuhi. Kedua, komponen proses yaitu para peneliti menekan beberapa aspek dalam proses kolaborasi. Ketiga, struktur dan tata kelola merupakan konsep organisasi yang berkembang meliputi beberapa unsur misalnya tujuan, pembagian kerja dan spesifikasi tugas, standar dan aturan prosedur operasi, serta hubungan otoritas. Keempat, kontigensi dan kendala merupakan dampak pada proses, yakni struktur, tata kelola kolaborasi, dan keberlanjutan secara menyeluruh. Kelima, hasil dan akuntabilitas yaitu hasil merupakan kombinasi tiga kategori lintas sektor, yaitu nilai publik: efek pertama, kedua, dan ketiga, ketahanan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan persoalan yang rumit sebab tidak jelas kerjasama tersebut untuk apa dan tanggung jawab kepada siapa. Dalam penilaian hasil antar satu anggota dengan yang lain bisa memiliki persepsi yang berbeda.

Mengacu pada teori diatas disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan peraturan yang dimana memiliki proses dan struktur dalam pengambilan keputusan publik serta mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan melibatkan

pemangku kepentingan.

Collaborative governance ialah proses pengambilan keputusan yang adil dan kolektif, yang memberikan otoritas kepada setiap partisipan dan memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka. *Collaborative governance* memiliki pendekatan antara lain kondisi awal, komponen proses, struktur dan tata kelola, kontingensi dan kendala, hasil dan akuntabilitas.

C. METODE PENELITIAN

Studi ini berjalan dengan teknik kualitatif, yang menurut John. W Creswell (Creswell, 2016) penelitian kualitatif ialah penelitian yang mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan melakukan wawancara kepada peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas, yang kemudian informasi tersebut dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi lebih dalam. Metode pendekatan riset ini ialah studi kasus (*case study*), yang merupakan strategi kualitatif yang mengkaji suatu program, proses, dan kejadian satu atau lebih individu yang mendalam. Hal-hal tersebut terbatas oleh aktivitas dan waktu, sehingga peneliti menggunakan berbagai macam cara dalam

mengumpulkan data untuk mendapat informasi selama periode tertentu (Cresswell, 2017). Lokasi penelitian berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, kantor PT. Ardhya Rizky Laju Abadi, dan kediaman Masyarakat pegawai pengangkut sampah. Subjek penelitian yaitu Kabid PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Direktur Utama PT. Ardhya Rizky Laju Abadi, dan masyarakat pegawai pengangkut sampah Kabupaten Batang. jenis dan sumber data menggunakan data primer dengan hasil dari wawancara dan dokumentasi dengan informan mengenai rangkaian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data sekunder dengan pengumpulan data sekunder didapat secara tidak langsung melalui penelusuran data olahan dari lembaga berwenang serta beberapa data pelengkap seperti literatur, surat kabar, jurnal ilmiah, internet, tabel, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Validasi data menggunakan *triangulate* yaitu sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang.**

1. Kondisi Awal

Kolaborasi dalam penanganan sampah di Kabupaten Batang sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan sampah. Kabupaten Batang sendiri dengan jumlah penduduk 849,69 ribu jiwa memiliki potensi menghasilkan sampah mencapai 184,87 ribu sampah pertahun, hal ini memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Batang, masyarakat, dan swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang menghadapi masalah yaitu keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas, operasional armada, dan pelaksanaan edukasi masyarakat. Selain itu, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia masih belum memadai. Hambatan dalam alokasi anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat program pengelolaan sampah yang efektif. Pentingnya melakukan kolaborasi pengelolaan sampah untuk menambah anggaran yang cukup untuk mendukung semua aspek pengelolaan sampah serta meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten agar melaksanakan tugas secara optimal. Kondisi awal kolaborasi

pengelolaan sampah di Kabupaten Batang masih menghadapi sejumlah tantangan dimulai dari keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, miskomunikasi, hingga kendala perizinan. Perlu adanya solusi strategis seperti koordinasi rutin, digitalisasi sistem pengelolaan, dan peningkatan peran masyarakat agar kolaborasi yang dilakukan dapat dioptimalkan. Kesuksesan kolaborasi sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk menyelesaikan hambatan yang ada dengan pendekatan menyeluruh, partisipatif, dan inovatif. Implementasi yang efektif akan membuat Kabupaten Batang dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dampak positif bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.

2. Komponen Proses

Kolaborasi menekankan pentingnya komponen proses yang terstruktur untuk mencapai keberhasilan dalam kerja sama antar pihak-pihak (Bryson, Crosby, dan Stone 2006). Komponen proses mengatur bagaimana pihak dapat bekerja sama secara terkoordinasi, tanpa adanya komponen proses yang jelas kolaborasi rentan terhadap konflik kepentingan, komunikasi yang buruk, dan kegagalan mencapai hasil yang diharapkan. Dinas Lingkungan Hidup dengan PT. Ardhya Rizky Laju Abadi

memiliki aspek utama dalam proses kolaborasi untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengelolaan sampah. Koordinasi merupakan aspek utama dalam keberhasilan kolaborasi pengelolaan sampah karena menjadi pondasi bagi sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Koordinasi berfungsi untuk memastikan bahwa kebutuhan setiap pihak dapat terpenuhi secara optimal. Koordinasi dalam pengelolaan sampah terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu koordinasi rutin dan koordinasi insidental. Koordinasi rutin dilakukan secara terjadwal untuk mengevaluasi progres kerja sama, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkala. Koordinasi insidental memiliki sifat darurat dan diperlukan untuk menangani situasi-situasi khusus yang tidak terduga, seperti contohnya adanya bencana alam. Koordinasi insidental sangat penting untuk memobilisasi sumber daya serta menentukan langkah responsif yang efektif. Analisis dari komponen proses dalam *Collaborative Governance*, Pemerintah Kabupaten Batang dengan PT. Ardhya Rizky Laju Abadi sudah melakukan tiap-tiap komponen proses mulai dari koordinasi untuk menentukan apa saja yang diperlukan dan siapa saja yang akan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan sampah, serta lokasi untuk mempermudah koordinasi antar pihak dilakukan dengan

berbagai cara. Aspek-aspek kolaborasi diperhatikan dengan melakukan monitoring dari awal hingga pelaksanaannya guna memperkecil hambatan.

3. Struktur dan Tata Kelola

Struktur dan tata kelola merupakan suatu organisasi atau kolaborasi yang memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kerja sama (Bryson, Crosby, dan Stone 2006). Pengelolaan sampah memerlukan struktur dan tata kelola untuk memperkuat pondasinya dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Batang. Struktur dan tata kelola memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing agar memastikan adanya pembagian tugas yang adil, transparan, dan maksimal. Struktur dan tata kelola memiliki tujuan dalam menangani sampah yang ada di Kabupaten Batang. Struktur dan tata kelola pengelolaan sampah di Kabupaten Batang telah dirancang secara sistematis untuk menciptakan kerja sama yang efektif diantara Dinas Lingkungan Hidup dengan PT. Ardhya Rizky Laju Abadi. Kejelasan peran, kepatuhan terhadap regulasi, komunikasi yang baik, dan evaluasi rutin menjadi faktor utama dalam keberhasilan program pengelolaan sampah. Namun, masih adanya langkah-langkah tambahan terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi

yang menyeluruh agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

4. Kontigensi dan Kendala

Kontigensi dan kendala dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Batang memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor kontigensi yang memengaruhi keberhasilannya. Kolaborasi sering kali menghadapi sejumlah kendala yang terdiri dari ketimpangan kekuasaan dan sumberdaya antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta. Masalah pengelolaan sampah melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi tantangan terbesar. Kolaborasi memerlukan langkah-langkah strategis seperti membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, menyusun kebijakan yang maksimal, mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelatihan dan edukasi. Proses kolaborasi sering kali menemui hambatan karena tidak hanya melibatkan satu pihak saja, hal ini juga ditemui pada proses kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Kontigensi dan kendala dalam proses *Collaborative Governance* pada pengelolaan sampah di Kabupaten Batang masih menghadapi kendala utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, keterbatasan

fasilitas, dan kapasitas TPA yang terbatas. Upaya mengatasi masalah tersebut setiap peran bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti Pemerintah Kabupaten Batang bertanggung jawab atas TPS, TPA, dan regulasi. PT. Ardhya Rizky Laju Abadi bertanggung jawab dalam pengangkutan. Masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Struktur organisasi yang solid dan pembagian tugas yang jelas menjadi kunci efektivitas kolaborasi. Keberlanjutan pengelolaan sampah bergantung pada perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, penganggaran yang memadai, dan monitoring berkala. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Batang, PT. Ardhya Rizky Laju Abadi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

5. Hasil dan Akuntabilitas

Hasil dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Batang merupakan elemen penting yang menjadi perhatian dalam setiap proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hasil mengacu kepada pencapaian tujuan yang diharapkan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas melibatkan pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan untuk mencapai

hasil tersebut. Hasil dan akuntabilitas memiliki aspek nilai publik dari sebuah kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Batang yang dapat dirasakan dampaknya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batang. Analisis dari hasil dan akuntabilitas dalam *Collaborative Governance* pengelolaan sampah di Kabupaten Batang masih menghadapi berbagai tantangan. Nilai publik sebagai tolak ukur keberhasilan kolaborasi belum sepenuhnya tercapai, terlihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan dan TPS yang mengalami kelebihan muatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah, serta sistem pengelolaan yang belum berjalan baik.

Akuntabilitas dalam kolaborasi juga belum maksimal, terutama dalam peran Pemerintah Kabupaten Batang sebagai pembuat kebijakan. Regulasi yang telah dibuat memiliki implementasi yang belum menghasilkan perubahan nyata yang signifikan. PT. Ardhya Rizky Laju Abadi sebagai mitra juga menilai bahwa keberhasilan kolaborasi seharusnya tercermin dalam penurunan volume sampah baik di TPS atau TPA, namun hal ini belum sepenuhnya terwujud. Keberlanjutan pengelolaan sampah memerlukan peningkatan koordinasi, evaluasi berkala, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar

dapat mencapai hasil yang optimal. Kepercayaan antar pihak wajib terus diperkuat untuk memastikan kolaborasi berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata di lingkungan masyarakat.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang menurut Bryson, Crosby, dan Stone memiliki 5 indikator utama yang terdiri dari kondisi awal, komponen proses, struktur dan tata kelola, kontigensi dan kendala, serta hasil dan akuntabilitas. Kondisi awal pada pengelolaan sampah di Kabupaten Batang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari kunci utamanya Pemerintah Kabupaten Batang melakukan koordinasi dengan mitranya yang dilakukan setiap bulannya untuk mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi utama dalam melakukan *collaborative governance*. Kedua, komponen proses dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik. Pihak pemerintah dan swasta sudah melakukan tiap-tiap komponen proses mulai dari koordinasi untuk menentukan apa yang diperlukan dan siapa saja yang akan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan sampah. Ketiga, struktur dan tata kelola dalam pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, karena struktur dan tata kelola dalam pengelolaan sampah sudah jelas dengan adanya pembagian tugas dan

wewenang antar pihak yang berkolaborasi. Keempat, kontigensi dan kendala dalam pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik, karena sering munculnya perilaku dari masyarakat yang kurang peduli dengan pengelolaan sampah meskipun pembagian tugas dan wewenang sudah dilaksanakan untuk meminimalisir masalah tetapi pihak Pemerintah belum bisa menemukan solusi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Kabupaten Batang. Kelima, hasil dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Batang belum berjalan dengan baik, karena dalam pengelolaan sampah belum terjadi perubahan yang signifikan pada volume sampah serta belum bisa menunjukkan hasil nyata dalam pengelolaan sampah.

Untuk meningkatkan efektivitas *collaborative governance* ke depannya, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, Rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah perlu mengembangkan strategi inovatif, seperti pemberian insentif bagi warga yang aktif dalam pengelolaan sampah atau sanksi bagi pelanggar aturan pembuangan sampah. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan sampah memberikan dampak nyata dengan menggunakan indikator yang lebih jelas dalam mengukur keberhasilan, seperti jumlah sampah yang berhasil didaur ulang, pengurangan volume sampah di TPA, serta peningkatan retribusi daerah dari

sektor pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. (2007). Good Governance. *Journal Sosiohumaniora*, 9(1), 37-47.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang. (2022). <https://batangkab.bps.go.id/staticta/ble/2023/05/23/655/perkembangan-volume-sampah-rata-rata-per-hari-dan-yang-terangkut-di-kabupaten-batang-2010-2022-.html>. Diakses pada 10 Oktober 2024.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang. (2022). Ekonomi Batang Tahun 2022 Tumbuh 5,97 Persen. <https://batangkab.bps.go.id/id/news/2023/03/02/172/ekonomi-batang-tahun-2022-tumbuh-5-97-persen.html>. Diakses pada 10 Oktober 2024.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang. (2023). Kabupaten Batang dalam Angka 2023. 10-23.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang. (2023). Kabupaten Batang dalam Angka 2023. 32-69.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang. (2023). Kabupaten Batang dalam Angka 2023. 69-92.

- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaboration: Proposition from The Literature. *Journal Public Administration Review*, 44-45.
- Cresswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanhuri, E. Dan Padmi, T. (2019). IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2016 CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN BATANG REGENCY (CASE STUDY OF FINAL RANDU KUNING TEGALSARI IN BATANG REGENCY). *Journal of public policy and Management Review*. Vol. 9, No. 1.
- Darmasaputra, A, dan Haryani, D. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang. *Journal of public policy and Management Review*. Vol. 9, No. 1.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. (2023). Profil Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023. 10-18.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. (2023). Profil Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2023. 19-28.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang. (2024). Tentang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi. <https://dlh.batangkab.go.id/?p=1&i.d=1>. Diakses pada 10 Oktober 2024.
- Dipo G.A. (2008). Tinjauan Pemilihan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3(2)2019:172-185
- DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3.(2023). <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/>.
- Emerson, K., Tina, N., & Stephen, B. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.
- Fitri, R,F, Ati, N.U, dan Suyeno, S. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU (studi kasus di Taman Pembuangan Akhir (TPA) Randengan Kota Mojokerto). *Respon Publik*, 13(4), 12-18.

- Gray, C dkk., (2007). Pengantar Evaluasi Proyek. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handayani, F. A., & Mohamad, I. N. (2019). Implementasi Good Governance di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1-11.
- Islami, I, A. (2021). Kebijakan Publik Dan Partisipasi Masyarakat Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tangerang Selatan, Banten. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jumadi. (2023). Kelola 20 Ton Sehari, Solusi Kurangi Penumpukan Sampah Di Batang. <https://berita.batangkab.go.id/?id=11568&p=1>. Diakses pada 14 Oktober 2024.
- Jung, Y. D., Mazmanian, D., & Tang, S. Y. (2009). Collaborative Governance In The United States and Korea: Case In Negotiated Policy Making and Service Delivery. Scholl of Policy, Planing and Development.
- Kenaga, I. (2020). Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014. Universitas Islam Riau.
- Khofifah, K. (2020). Kajian Pengelolaan Sampah Di Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. 2003. *SANKRI: Buku 1 prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*. Penerbit: Lembaga Administrasi Negara.
- Nagong, A. (2020). Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Jurnal Administrative Reform, Vol 8, (2); 105-112
- Noor, M., Falih, s., & Antun, M. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Pemerintah Kabupaten Batang. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2021. Provinsi Jawa Tengah.
- Sambodo, Giat Tris. (2016). Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogi, DI. Yogyakarta Vol 3 No 1. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025. <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tresiena, Novianti dan Duadji, Noverman. (2017). Kolaboratif

Pengelolaan Teluk Kiluan (*Collaborative Management Of The Teluk Kiluan Tourism*). Diakses tanggal 20 Maret 2025.

<http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/sef/ila/article/view/399>

